

Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Belanja Modal sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi)

Ibnu Hajar*, Afrizal, Fatia Fatimah, Milde Wahyu, Iis Solihat, Joner Simarmata

Program Pascasarjana Universitas Terbuka

*Correspondence: ibnuhajar4892@gmail.com

Abstrak. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Provinsi Jambi belum optimal, hal ini disebabkan rasio antara belanja langsung dan tidak langsung tidak ideal. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk: 1) menguji signifikansi pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan dana perimbangan secara individual terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi tahun 2016-2020; 2) menguji signifikansi pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan dana perimbangan secara serentak terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi tahun 2016-2020; dan 3) menguji apakah belanja modal mampu menjadi variabel moderating antara Pendapatan Asli Daerah dan dana perimbangan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi tahun 2016-2020. Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian kausal. Populasi pada penelitian ini adalah pemerintahan kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi Jambi yang terdiri dari 9 kabupaten dan 2 kota. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) secara individual Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sedangkan dana perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah; 2) secara bersama-sama Pendapatan Asli Daerah dan dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah; dan 3) berdasarkan hasil uji residual menunjukkan bahwa belanja modal merupakan variabel yang hanya dapat memoderasi hubungan antara Pendapatan Asli Daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kata kunci: PAD, dana perimbangan, belanja modal, kinerja keuangan

Abstract. Regional Budget of Revenue and Expenditure Management in Jambi Province is not yet optimal, due to the inadequate ratio between direct and indirect expenditure. The purposes of this research are to: 1) examine the impact of District Own-Source Revenue and equalization fund individually towards local government financial performance on regency/city of Jambi Province 2016-2020; 2) examine the significance of District Own-Source Revenue and equalization fund impact simultaneously towards local government financial performance on regency/city of Jambi Province 2016-2020; dan 3) examine whether capital expenditures is capable to become the moderating variable between District Own-Source Revenue and equalization fund with local government financial performance on regency/city of Jambi Province 2016-2020. This research uses the type of causal research. The population of this research is regency/city government in Jambi Province which consists of 9 regencies and 2 cities. Data analysis technique that is used in this research is multiple linear regression analysis. The result indicates that: 1) individually District Own-Source Revenue gives positive and significant impact towards local government financial performance, meanwhile equalization fund gives negative and significant impact towards local government financial performance; 2) both District Own-Source Revenue and equalization Fund significantly impact local government financial performance; and 3) based on residual test results, it shows that capital expenditures is the only variable that is able to moderate the correlation between District Own-Source Revenue towards local government financial performance.

Keywords: district own-source revenue, equalization fund, capital expenditures, financial performance

PENDAHULUAN

Karakteristik utama yang menggambarkan sebuah daerah otonom dapat menjalankan perannya yakni terlihat pada kemampuan keuangan daerah. Maksudnya, daerah otonom harus mempunyai kewenangan dan kemampuan dalam menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan

keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan pada pemerintahan pusat harus seminimal mungkin, sehingga sumber penerimaan dari PAD harus ditingkatkan dari tahun ke tahun (Amin, 2019).

Sejalan dengan tujuan otonomi dan outcome, APBD disusun dengan tujuan agar

kebijakan ekonomi makro selaras dengan ketersediaan SDA, pengalokasiannya dengan tepat dan dipersiapkannya keadaan pelaksanaan dalam mengelola budget (anggaran) daerah yakni agar daerah mandiri untuk itu pemerintah daerah perlu mengupayakan agar PAD meningkat secara optimal dan sumber pendanaan bagi daerah untuk membiayai kegiatan operasional pemerintahan daerah dari PAD dan sumber pendanaan daerah dari dana perimbangan.

Untuk mengelola keuangan daerah yang demokratis, efektif, transparan, akuntabel dan efisien, digunakan rasio keuangan dengan APBD. Adapun rasio yang digunakan yakni rasio upaya fiskal, merupakan perbandingan realisasi PAD dengan target PAD. Rasio ini untuk mengetahui kesanggupan daerah dalam pencapaian dari target yang penerimaan daerahnya. Kinerja keuangan sebagai tolak ukur (kinerja) dengan memakai indikator keuangan. Penilaian terhadap kinerja sebelumnya dengan bermacam analisis merupakan tujuan dari menganalisis kinerja keuangan. Kinerja keuangan daerah adalah kesanggupan pemerintahan daerah dalam memperoleh keuangan daerah dengan menggali potensi dari daerah tersebut.

PAD merupakan sumber dari pembiayaan daerah. Untuk itu, kemampuan dalam penggalan dari sumber PAD mempengaruhi akan berpengaruh terhadap pembangunan daerah tersebut. Daerah-daerah yang termasuk daerah yang beruntung dikarenakan mempunyai sumber penerimaan daerah yang potensial, berasal dari: pajak daerah, retribusi daerah ataupun tersedianya SDA yang potensial yang dapat menjadi sumber penerimaan daerah. Untuk sebagian daerah, otonomi daerah bisa jadi menyebabkan masalah tersendiri karena daerah dituntut agar lebih mandiri. Setiap daerah memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Berbagai usaha yang bisa dilaksanakan oleh pemerintahan daerah agar penerimaan daerah meningkat. Agar berkurangnya ketergantungan pemerintahan daerah pada pemerintahan pusat, daerah diharuskan lebih optimal dalam pengelolaan potensi dari daerah tersebut.

Selain bermaksud untuk membantu daerah untuk mendanai kewenangannya, dana perimbangan juga bermaksud mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah pusat dengan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan antar daerah (Amin, 2019). Menurut UU No.33 tahun 2004 untuk daerah diperuntukkan dana perimbangan yang terdapat didalam APBN dalam rangka

melaksanakan desentralisasi. Adapun maksud dari diberikan dana perimbangan yaitu agar defisit fiskal atas pembiayaan yang tidak sanggup ditutupi dari Pendapatan Asli Daerah dapat ditutupi serta peningkatan kesanggupan daerah dalam menggali kekayaan daerahnya. Belanja modal ialah belanja dari pemerintah yang diperuntukkan bagi pembangunan sarana dan prasarana. Peningkatan belanja modal dapat menyebabkan peningkatan produktivitas ekonomi, makin besar belanja modal dapat meningkatkan produktivitas ekonomi. Belanja modal untuk infrastruktur akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Pertumbuhan ekonomi daerah akan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan peningkatan PAD. Makin tinggi PAD maka belanja daerah untuk pembangunan juga makin besar karena alokasi belanja modal bersumber dari PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Penurunan penerimaan daerah berpengaruh terhadap dana perimbangan disebabkan sampai sekarang pemerintah daerah belum mampu untuk menutupi belanja daerah yang bersumber dari PAD. Dalam rangka pelayanan publik pemerintah memerlukan infrastruktur (sarana dan prasarana) agar aktivitas operasional berjalan dengan lancar. Anggaran belanja modal meningkat setiap tahun sejalan dengan peningkatan pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah daerah untuk merangsang kegiatan ekonomi. Besarnya pengalokasian dana untuk belanja modal akan meningkatkan infrastruktur dan sarana untuk mendukung kegiatan pemerintah daerah.

Penelitian Budianto & Alexander (2016), Agriyanto & Farida (2019), Putri & Yuniarta (2023) sejalan dengan hipotesis yaitu adanya pengaruh positif dari PAD terhadap kinerja keuangan daerah. Sedangkan temuan hasil penelitian Andirfa dkk (2016) yaitu PAD tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Hasil temuan Budianto & Alexander (2016), Andirfa dkk (2016) dan Putri & Yuniarta (2023) yaitu adanya pengaruh negatif dan signifikan antara dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintahan daerah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa ketika terjadi peningkatan dana perimbangan akan menyebabkan kinerja keuangan pemerintah daerah menurun. Sementara itu hasil penelitian lain menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan (Budiana & Rahayu, 2021).

Provinsi Jambi adalah salah provinsi yang berada di Sumatera yang terdiri dari 11 kabupaten/kota, berdasarkan hasil pengamatan di Provinsi Jambi pengelolaan APBD belum optimal. Hal ini dikarenakan rasio antara belanja langsung dan tidak langsung tidak ideal dimana porsi belanja langsung ideal adalah antara 70% dan belanja tidak langsungnya 30%, sedangkan fenomena di Provinsi Jambi tahun 2016 porsi belanja langsung adalah 48,65% dan belanja tidak langsung sebesar 48,77% sedangkan pada tahun 2017 porsi belanja langsung turun menjadi

41,16% dan belanja tidak langsung adalah sebesar 49,018% dan pada tahun 2018 porsi belanja langsung adalah 36,815% dan belanja tidak langsung adalah sebesar 49,41%, sedangkan tahun 2019 porsi belanja langsung adalah 44,01% dan belanja tidak langsung sebesar 55,68%. Kondisi APBD Provinsi Jambi saat ini haruslah jadi peringatan, apabila hal tersebut berlangsung terus akan menghambat pelaksanaan program pembangunan, dikarenakan ketersediaan dana tidak seimbang dengan program yang akan dilaksanakan.

Tabel 1
Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Provinsi Jambi
Tahun 2016-2020 (Juta Rp)

Tahun	PAD	%	Dana perimbangan	%	Belanja modal	%
2016	1.192.292	-	1.398.290	-	945.539	-
2017	1.580.533	32,56	2.723.261	94,76	895.648	-5,28
2018	1.656.570	4,81	2.745.222	0,81	784.724	-12,38
2019	1.651.090	-0,33	2.896.754	5,52	866.501	10,42
2020	1.665.326	0,86	3.015.902	4,11	1.056.496	21,93
Rata-rata		9,48	Rata-rata	26,30	Rata-rata	3,67

Sumber: BPS Jambi, 2021 (data diolah)

Realisasi PAD, dana perimbangan dan belanja modal Provinsi Jambi ditampilkan pada tabel 1. PAD Provinsi Jambi meningkat dengan rata-rata 9,48%, dana perimbangan meningkat sebesar 26,30% per tahun dan belanja modal meningkat sebesar 3,67% per tahun. Pada tahun 2019 PAD turun 0,33% sedangkan dana perimbangan serta belanja modal meningkat masing-masing 5,52% dan 10,42%. Pada tahun 2017 dan 2018 belanja modal turun sedangkan PAD dan dana perimbangan mengalami peningkatan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah belanja modal mampu menjadi variabel moderating antara PAD dan dana perimbangan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah kab/kota di Provinsi Jambi tahun 2016-2020

Kajian Teori

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Kemendagri No. 13 Tahun 2006 yang sudah mengalami perubahan menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 mengenai pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara menyusun APBD, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan APBD, bahwa tolak ukur kinerja merupakan komponen lainnya yang semestinya dilakukan pengembangan sebagai

dasar untuk mengukur kinerja keuangan dalam sistem anggaran kinerja (Adisasmita, 2011).

Ada beberapa rasio untuk mengukur rasio kinerja keuangan pemerintah daerah, yakni:

1. Rasio kemandirian keuangan daerah. Rasio ini diukur dari perbandingan jumlah penerimaan PAD dengan jumlah transfer dari pemerintahan pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Makin tinggi nilai rasio ini menggambarkan pemerintahan daerah makin tinggi kemandiriannya dari sisi keuangan daerah. Formula untuk menghitung rasio kemandirian keuangan daerah (Kawatu, 2019). Rasio ini memberikan gambaran berapa besar tingkat ketergantungan dari suatu daerah pada sumber dana ekstrem. Makin besar rasio makin rendah tingkat ketergantungan pemerintahan daerah terhadap pemerintahan pusat ataupun provinsi, demikian juga sebaliknya. Rasio ini juga mengindikasikan tingkat keikutsertaan masyarakat terhadap pembangunan daerah. Makin tinggi rasio kemandirian artinya makin tinggi tingkat partisipasi masyarakat terhadap pembayaran retribusi dan pajak yang termasuk bagian dari Pendapatan Asli Daerah yang mengindikasikan tingkat kemakmuran masyarakat yang makin tinggi.
2. Rasio ketergantungan keuangan daerah. Perhitungan rasio ini yaitu perbandingan

antara jumlah pendapatan berupa transferan yang diperoleh pemerintahan dengan keseluruhan jumlah dari pendapatan daerah (Kawatu, 2019).

3. Rasio desentralisasi fiskal. Rasio ini menggambarkan kemampuan penerimaan daerah dibandingkan dengan total pendapatan ataupun pengeluaran daerah (Tan, 2013).

PAD (Pendapatan Asli Daerah)

Salah satu sumber penerimaan daerah, PAD harus ditingkatkan seideal mungkin agar tercapai kemandirian daerah. Mandiri merupakan semangat dan keyakinan yang kokoh untuk membina mengelola daerahnya dengan tidak hanya mengandalkan fasilitas atau faktor yang datang dari luar. Meskipun dianggap mayoritas daerah otonom (kabupaten/kotamadya), kemampuan PAD masih rendah, untuk itu masih dibutuhkan dana dari pusat (Adisasmita, 2011). Ada beberapa pemerintahan daerah yang mengartikan otonomi daerah sebagai wewenang daerah dalam menaikkan PAD sebesar-besarnya. Dampak dari pengertian tersebut otonomi daerah didefinisikan sebagai automoney (Simanjuntak dalam Amir, 2007). Maksudnya semakin banyak PAD maka semakin luas otonomi yang dimiliki daerah dan makin rendah PAD maka makin rendah otonomi yang dimiliki. Oleh sebab itu setiap daerah berusaha agar PAD yang diperoleh meningkat signifikan.

Dana Perimbangan

Dana perimbangan diartikan sebagai penerimaan daerah yang bersumber dari dana APBN untuk membantu terlaksananya wewenang pemerintah daerah agar tercapai tujuan dari otonomi daerah yakni meningkatkan pelayanan dan terciptanya masyarakat yang sejahtera. Dana perimbangan adalah kumpulan sumber pendanaan desentralisasi yang pengalokasiannya tak dapat dipisahkan, dengan mempertimbangkan tujuan dari setiap penerimaan saling melengkapi dan mengisi (Adisasmita, 2011). Alokasi dana perimbangan dari pemerintahan pusat adalah yang paling dominan dari pendapatan daerah. Ada beberapa pengelompokan dari dana perimbangan, diantaranya: 1) Dana Bagi Hasil (DBH), 2) Dana

Alokasi Umum (DAU) dan 3) Dana Alokasi Khusus (DAK). Ada beberapa pemerintahan daerah yang masih akan menerima DAK dan dana penyesuaian dari pusat. Dari kelompok dana perimbangan dapat dibedakan antara dana perimbangan yang dapat dikendalikan dengan yang diluar kendali (Mahmudi, 2010).

Belanja Modal

PP No.71 tahun 2010 dijelaskan bahwa belanja modal yaitu pengeluaran anggaran atas perolehan aktiva tetap dan aktiva lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal terdiri dari tanah, bangunan dan gedung, peralatan, aktiva tidak berwujud. Belanja modal dimanfaatkan untuk membeli aktiva tetap pemerintah daerah misalnya peralatan, infrastruktur dan aktiva tetap lainnya. Cara memperoleh belanja modal yaitu melakukan pembelian dengan cara lelang maupun tender.

METODE

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kausal. Jenis penelitian ini dipergunakan untuk menganalisis keterkaitan antar variabel yang diteliti. Tujuan dari desain penelitian ini adalah untuk membuktikan dan menganalisa pengaruh dari PAD dan dana perimbangan sebagai variabel independen terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada kab/kota di provinsi Jambi sebagai *dependent variable*.

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Adapun sumber data pada penelitian ini adalah Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi Jambi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah realisasi pendapatan daerah kab/kota yang di provinsi Jambi dalam kurun waktu 2016-2020. Untuk menjawab tujuan dari penelitian ini digunakan model regresi linear berganda. Adapun rumus yang digunakan adalah (Widarjono, 2009): $Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e_i$ Dimana: Y = Kinerja keuangan pemerintah daerah; X_1 = PAD; X_2 = Dana Perimbangan; β_0 = Constant; $\beta_{1,2}$ = Koefisien regresi; e_i = Kesalahan pengganggu

HASIL

Tabel 2
Uji F

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1133.575	2	566.788	217.062	.000 ^b

Residual	135.781	52	2.611
Total	1269.356	54	

Sumber: data olahan

Tabel 2 menjelaskan hasil perhitungan uji F diperoleh nilai sig. adalah $0,000 < 0,05$ artinya X_1 (PAD) dan X_2 (dana peimbangan) secara serentak signifikan pengaruhnya terhadap Y (kinerja keuangan pemerintahan daerah).

Tabel 3
Uji t

	Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	15,448	2,232		6,920	,081
	Gaya Kepemimpinan	,165	,094	,226	1,744	,087
	Motivasi	,190	,135	,086	,664	,509

Sumber: data olahan

Tabel 2 dapat dilihat secara individu pengaruh dari *independent variable* terhadap *dependent variable* dijelaskan berikut ini:

1. X_1 (PAD) dengan sig. $0,000 < 0,05$ dan *regression coefficient* memiliki tanda positif. Artinya adanya pengaruh positif dan signifikan antara X_1 (PAD) dan Y (kinerja keuangan pemerintahan daerah).
2. X_2 (dana perimbangan) dengan sig. $0,000 < 0,05$ dan *regression coefficient* memiliki tanda negatif. Artinya adanya pengaruh yang negatif dan signifikan antara X_2 (dana perimbangan) dan Y (kinerja keuangan pemerintahan daerah).

Bentuk persamaan regresi, yakni: $Y = 12,466 + 21,899\text{Log}X_1 - 19,920\text{Log}X_2 + e_i$.
Dengan penjelasan sebagai berikut:

- $\beta_0 = 12,466$, artinya jika X_1 (PAD) dan X_2 (dana perimbangan) dianggap nol maka Y (kinerja keuangan pemerintahan daerah) sebesar 12,466%.
- $\beta_1 = 21,899$, artinya jika X_1 (PAD) meningkat 1% maka Y (kinerja keuangan pemerintahan daerah) akan meningkat sebesar 21,899%.
- $\beta_2 = -19,920$, artinya jika X_2 (dana perimbangan) meningkat 1% maka Y (kinerja keuangan pemerintahan daerah) akan turun sebesar 19,920%.

Tabel 4 menjelaskan hasil yang diperoleh R square sebesar 0,893 atau 89,3%. Artinya X_1 (PAD) dan X_2 (dana perimbangan) dapat menerangkan variasi Y (kinerja keuangan pemerintahan daerah) yaitu 89,3% dan residunya 10,7% diterangkan *variable* yang lain di luar persamaan regresi.

Tabel 4
Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.945 ^a	.893	.889	1.61591238

Sumber: data olahan

Tabel 5
Uji Selisih Nilai Mutlak

	Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.796	.382		20.383	.000
	Zscore PAD	5.410	.260	1.116	20.812	.000
	Zscore Dana Perimbangan	-2.318	.346	-.478	-6.696	.000
	Zscore Belanja Modal	1.082	.271	.223	3.999	.000
	Moderasi1	.642	.352	.082	1.824	.074
	Moderasi2	.143	.443	.016	.324	.748

Sumber: data olahan

Tabel 5 menjelaskan hasil analisis coefficients, yaitu:

1. Berdasarkan output coefficients diperoleh koefisien regresi variabel PAD sebesar 5,410 dengan sig. $0,000 < 0,10$ ($\alpha=10\%$), artinya X1 (PAD) pengaruhnya positif dan signifikan terhadap Y (kinerja keuangan pemerintahan daerah)
2. Berdasarkan output coefficients besarnya koefisien regresi variabel dana perimbangan yaitu -2,318 dan sig. $0,000 < 0,10$ ($\alpha=10\%$), maka kesimpulannya yaitu X2 (dana perimbangan) pengaruhnya negatif dan signifikan terhadap Y (kinerja keuangan pemerintahan daerah)
3. Berdasarkan output coefficients diperoleh koefisien regresi Z (belanja modal) sebesar 1,082 dan sig. $0,000 < 0,10$ ($\alpha=10\%$), maka kesimpulannya yaitu Z (belanja modal) pengaruhnya positif dan signifikan terhadap Y (kinerja keuangan pemerintah daerah)
4. Berdasarkan output coefficients diperoleh koefisien regresi variabel moderasi sebesar 0,641 dan sig. $0,074 > 0,10$ ($\alpha=10\%$), maka kesimpulannya yaitu Z (belanja modal) mampu memoderasi hubungan X1 (PAD) dengan Y (kinerja keuangan pemerintah daerah)
5. Berdasarkan output coefficients diperoleh koefisien regresi variabel moderasi 2 yaitu 0,143 dan nilai sig. $0,748 > 0,10$ ($\alpha=10\%$), maka kesimpulannya yaitu variabel Z (belanja modal) tidak mampu memoderasi hubungan X2 (dana perimbangan) dengan Y (kinerja keuangan pemerintah daerah)

Pengaruh X1 (PAD) terhadap Y (kinerja keuangan pemerintah daerah)

Hasil uji t diketahui bahwa variabel X1 (PAD) secara individu pengaruhnya positif dan signifikan terhadap Y (kinerja keuangan pemerintah daerah). Hal ini disebabkan oleh X1 (PAD) sebagai salah satu sumber dana yang dimanfaatkan pemerintahan daerah untuk pembiayaan pembangunan daerah yang berdampak terhadap pelayanan pada masyarakat. Untuk itu diharapkan pemerintah daerah mampu menaikkan PAD agar dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. PAD adalah kebutuhan yang sangat penting dikarenakan PAD mampu mendorong terciptanya pelaksanaan otonomi dan mampu meningkatkan kemandirian pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan daerahnya. Makin besar PAD pemerintahan daerah, makin kecil kemungkinan pemerintah

daerah akan mengalami masalah keuangan untuk mendanai infrastruktur untuk pembangunan. Daerah yang PAD-nya besar akan memiliki kesempatan dalam peningkatan dalam membangun infrastruktur, infrastruktur akan berdampak baik terhadap maju atau tidaknya suatu daerah dan kinerja keuangan daerah. Begitu juga sebaliknya kecilnya PAD menyebabkan daerah memiliki kesempatan yang kecil dalam membangun infrastruktur, hal ini berdampak pada kinerja keuangan daerah yang tak begitu signifikan. Hasil studi ini yaitu PAD pengaruhnya signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Agriyanto & Farida (2019) yang membuktikan adanya pengaruh positif dan signifikan PAD terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun hasil studi ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Andirfa & Majid (2016) yang menemukan bahwa tidak adanya pengaruh PAD terhadap kinerja keuangan pemerintahan daerah.

Pengaruh X2 (dana perimbangan) terhadap Y (kinerja keuangan pemerintah daerah)

Berdasarkan perhitungan uji t dapat dijelaskan bahwa X2 (dana perimbangan) secara individu pengaruhnya negatif dan signifikan terhadap Y (kinerja keuangan pemerintahan daerah). Otonomi daerah bertujuan supaya pemerintah daerah mandiri dan tidak tergantung pada pemerintah pusat. Untuk itu pemerintah pusat sudah menyerahkan wewenang pada daerah agar menggali potensi daerah masing-masing dengan tujuan supaya terjadinya peningkatan PAD dan berkurangnya ketergantungan pada pemerintah pusat. Tujuan dari dana perimbangan yaitu untuk pembiayaan surplus pengeluaran daerah. Untuk menutupi defisit pengeluaran daerah pemerintahan pusat mentransfer dana ke pemerintahan daerah dalam bentuk dana perimbangan. Makin besar dana perimbangan yang diperoleh pemerintah daerah mengindikasikan bahwa makin tinggi ketergantungan terhadap pemerintahan pusat artinya turunnya kinerja keuangan pemerintahan daerah. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Budianto & Alexander (2016), Andirfa & Majid (2016) yang menemukan adanya pengaruh yang negatif dan signifikan dari dana perimbangan terhadap keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini juga mendukung penelitian Wijaya & Candradiningrat (2021), Yuliansyah & Yanti (2019) yang menemukan bahwa adanya pengaruh yang negatif dan signifikan dari dana

perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintahan daerah.

Pengaruh X1 (PAD) dan X2 (dana perimbangan) secara simultan terhadap Y (kinerja keuangan pemerintahan daerah)

Hasil pengujian secara simultan membuktikan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara X1 (PAD) dan X2 (dana perimbangan) terhadap Y (kinerja keuangan pemerintahan daerah). Hal ini dapat dibuktikan dari hasil perhitungan program SPSS dimana sig. sebesar 0,000, artinya adanya pengaruh yang signifikan antara X1 (PAD) dan X2 (dana perimbangan) secara serentak terhadap Y (kinerja keuangan pemerintahan daerah).

Belanja modal sebagai variabel moderasi pengaruh PAD terhadap kinerja keuangan pemerintahan daerah

Hasil uji nilai selisih mutlak (absolut residual) diketahui bahwa moderasi memperoleh nilai signifikansi $< 0,1$ yakni 0,074. Artinya belanja modal mampu menjadi variabel moderating antara X1 dan Y.

Belanja modal adalah bagian dari pengeluaran daerah yang dipakai dalam pendanaan aktivitas pembangunan yang diperuntukkan bagi kepentingan publik. Makin besar belanja modal dapat mendorong peningkatan PAD sehingga dapat mendorong peningkatan kinerja keuangan daerah, sebaliknya kecilnya belanja modal dapat menyebabkan rendahnya PAD sehingga kinerja keuangan daerah juga rendah.

Belanja modal sebagai variabel moderasi pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintahan daerah

Hasil uji absolut residual (nilai selisih mutlak) diketahui bahwa moderasi 2 memperoleh nilai signifikansi $> 0,1$ yakni 0,748. Artinya belanja modal tidak mampu memoderating korelasi antara X1 dan Y. Belanja modal, otonomi daerah serta desentralisasi bisa terlepas dari pelaksanaan pembangunan. Pembangunan daerah merupakan wujud dan upaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan. Pembangunan daerah tidak mungkin terwujud tanpa adanya pembangunan fisik berupa sarana dan prasarana. Pembangunan fisik tersebut dapat dilakukan jika perencanaannya dianggarkan dalam APBD pada pos belanja, khususnya belanja modal. Belanja modal pada umumnya dialokasikan untuk perolehan asset tetap yang dapat dimanfaatkan

sebagai sarana pembangunan daerah. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan pemerintahan daerah dan antar pemerintah daerah. Dana perimbangan terdiri dari DAU, DAK dan DBH merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk membiayai kelebihan belanja daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belanja modal tidak memperkuat pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa dengan ataupun tidak adanya belanja modal dana perimbangan tetap berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian disimpulkan yaitu secara individual variabel independen yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah adalah PAD sedangkan dana perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan, secara bersama-sama PAD dan dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, dan berdasarkan hasil uji residual menunjukkan bahwa belanja modal merupakan variabel yang hanya dapat memoderasi hubungan antara PAD terhadap kinerja keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. 2011, *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Amin, F. 2019, *Penganggaran di Pemerintah Daerah dalam Perspektif Teoritis, Normatif, dan Empiris*. Malang: UB Presss.
- Andirfa, M., Basri, H. and Majid, A.S.M. 2016, Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh, *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 5(3), 30–38.
- Awwaliyah, F.N., Agriyanto, R. and Farida, N.D. 2019, The Effect of Regional Original Income and Balance Funding on Regional Government Financial Performance, *Journal of Islamic Accounting and Finance Research*, 1(1), 25–45.

- Budiana, R. and Rahayu, S. 2021, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia Tahun 2020), *e-Proceeding of Management*, 8(6), 8368–8375.
- Budianto and Alexander, W.S. 2016, Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara, *EMBA*, 4(4), 644–851.
- Kawatu, S.F. 2019 *Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik*. Yogyakarta
- Mahmudi, 2010, *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Putri, S.A.P.N. and Yuniarta, A.G. 2023, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2017-2021, *Jurnal Akuntansi Profesi*, 14(1), 133–147.
- Widarjono, A. 2009, *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Wijaya, P.A.K.. and Candradiningrat, R.I. 2021, Regional Revenue and Balanced funds on the Financial Performance of the Regional Government (Empirical Study at Tabanan, Bali, Indonesia), *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*, 5(5), 304–309.
- Yuliansyah, R., Susanti, I.E. and Yanti, A. 2019, The Effect of Regional Original Revenue, Balance Funds, and Capital Expenditures on the Financial Performance of District Governments in West Java Province in 2013-2017, *Advances in Economics, Business and Management Research*, 127, 152–156.